



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2017**

Ringkasan Eksekutif

Dengan memperhatikan program prioritas daerah dan isu-isu strategis bidang komunikasi dan informatika terkini, serta mengacu pada Renstra 2016–2021, sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 yang merupakan implementasi dari 1 (satu) program prioritas yaitu: Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Dari hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja tersebut, semua indikator kinerja dapat mencapai target yang diharapkan

Uraian dan status capaian dari kedua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	65.5	78.93	121% (tercapai)
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	84%	84%	100% (tercapai)

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2017

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada TA 2017 adalah Rp.11.760.509.800 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp9.697.817.341 atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,46%, maka dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 2.062.692.459

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya semata Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017 (LKJIP) dapat terselesaikan tepat waktu

Disusunnya LKJIP ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.LKJIP ini memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017.LKJIP ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Akhirnya diharapkan keterlibatan, komitmen dan upaya yang terus menerus dari semua elemen dalam organisasi ini untuk dapat mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika , 'Balikpapan Smart Government'.

Balikpapan Pebruari

2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Tatang Sudirja

DAFTAR ISI

Ringkasan eksekutif	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
Bab I PENDAHULUAN	6
1. LATAR BELAKANG	6
2. LANDASAN HUKUM	7
3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
4. DATA ORGANISASI	8
5. PERMASALAHAN STRATEGIS	12
6. SISTEMATIKA PELAPORAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
1. RENCANA STRATEGIS	17
2. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
2. REALISASI ANGGARAN	36
CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.....	10
Tabel 2.1 Kesesuaian Renstra dengan RPJMD.....	20
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	22
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	28
Tabel 3.3 Daftar Nama Aplikasi.....	31
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator sasaran program dan Kegiatan.....	35
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	36
Tabel 3.6 Perbandingan target dan realisasi sesuai sasaran strategis.....	37
Tabel 3.7 Perbandingan program kegiatan dalam Renstra dan DPA.....	39
Tabel 3.8 Penghargaan dan Prestasi 2017.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	9
Gambar 1.2	Rincian Pegawai Diskominfo berdasarkan Esselon	11
Gambar 1.3	Rincian Pegawai Diskominfo berdasarkan Golongan	11
Gambar 1.4	Rincian Pegawai Diskominfo berdasarkan Gender.....	12
Gambar 2.1	Alur Penyusunan Renstra.....	19
Gambar 2.2	Program Prioritas dan program pendukung.....	24
Gambar 2.3	Alur penyusunan perjanjian Kinerja Diskominfo.....	24
Gambar 3.1	Perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU 1.....	30
Gambar 3.1	Perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU 2.....	34

BAB. I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan TIK dan pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi, Bina Egovernment serta LPSE;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan TIK, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, pos dan telekomunikasi serta LPSE;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Eselon IV di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian tersebut tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, maka ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Walikota dengan kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV.

Laporan Kinerja ini disusun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2017, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja Dinas komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

I. 2 Landasan Hukum

1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang- undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

I. 3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempratekkan prinsip – prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

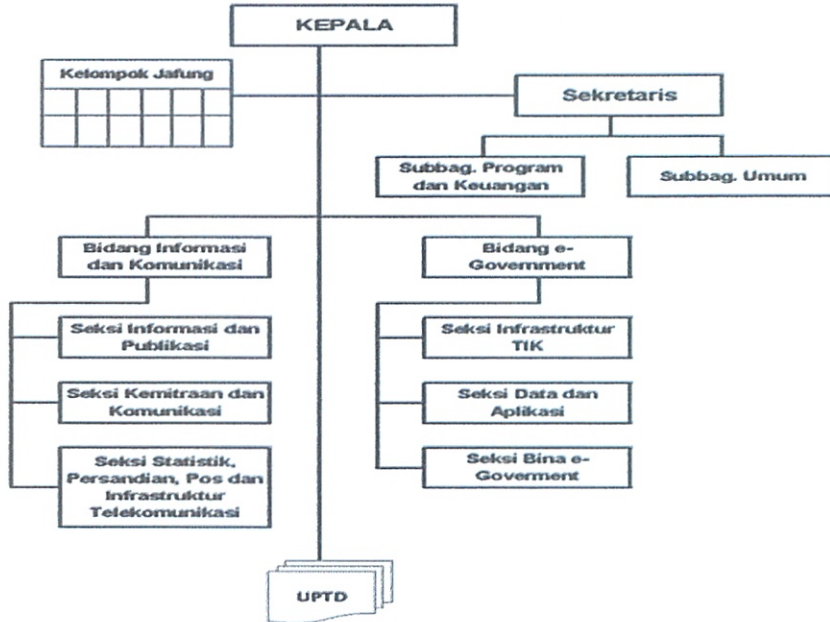
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017.

I. 4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Potensi Sumber Daya

I.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas komunikasi dan informatika



Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang membawahkan
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahkan:
 1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 2. Seksi Kemitraan dan Komunikasi; dan
 3. Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi;
- d. Bidang e-Government, yang membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Data dan Aplikasi; dan
 3. Seksi Bina e-Government;

- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.4.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No. 1 – RT 13 Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, telephone (0542) 737584; dan Fax. (0542) 733711.

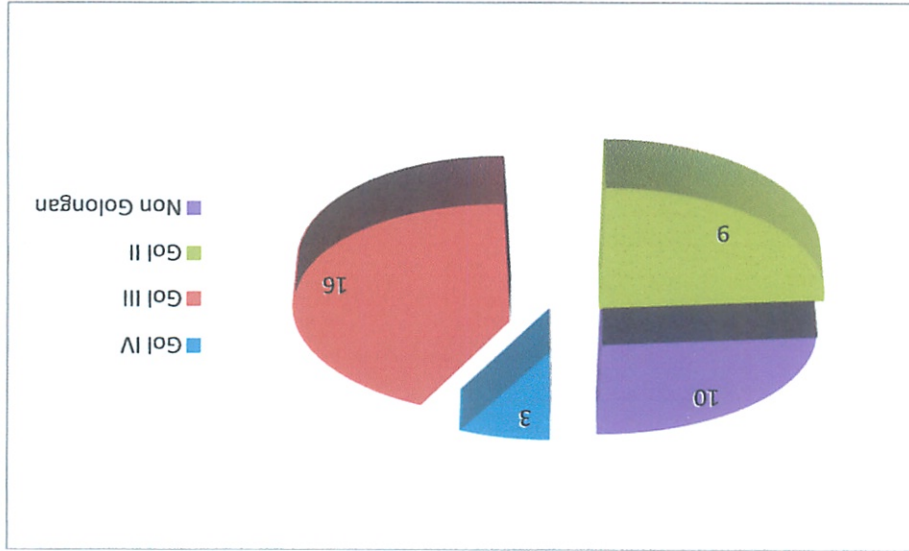
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 35 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Bantuan sebanyak 10 orang. Berdasarkan eselon, jumlah pegawai eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang dan eselon IV sebanyak 8 orang. Adapun pelaksana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berjumlah 27 orang.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berdasarkan Eselon dan Golongan. Berikut rincian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Tabel 1.4

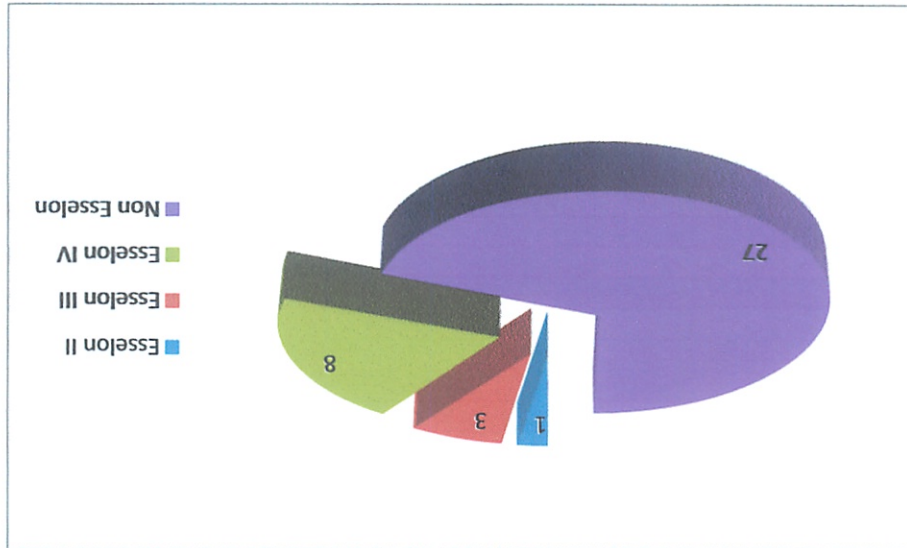
Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Naban	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Sekretaris	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.	Kepala Bidang	0	2	0	0	0	0	0	0	2
4.	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5.	Kepala Seksi	0	0	6	0	0	0	0	0	4
6.	Pelaksana	0	0	0	0	8	9	0	10	27
TOTAL										38



Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan

Gambar 1.3

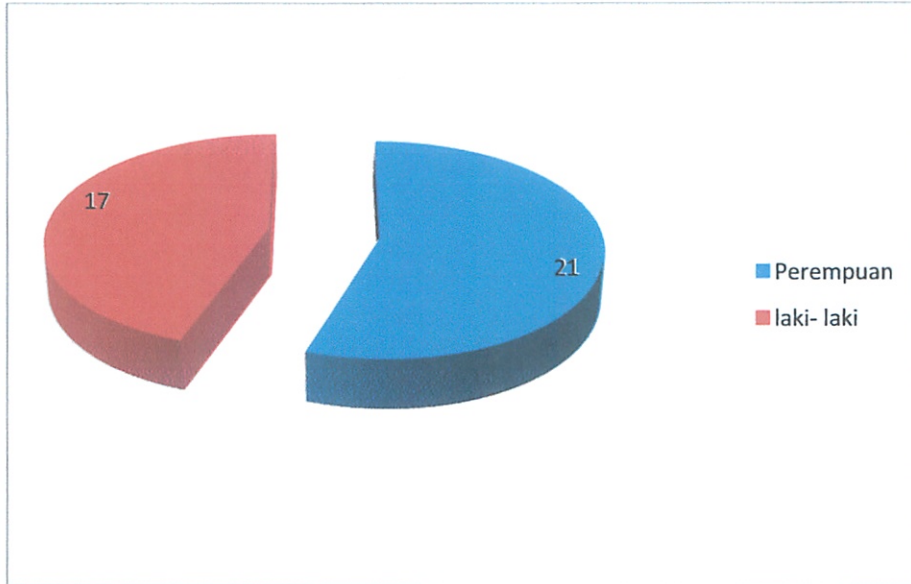


Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Berdasarkan Eselon

Gambar 1.2

Gambar 1.4

Rincian Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Berdasarkan Gender



I. 5 Permasalahan Strategis

I.5.1 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 2 (dua) permasalahan utama yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah. Kedua permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

1. Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung Balikpapan Cyber City.

E Government adalah penggunaan teknologi oleh Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menghubungi masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan lain yang terkait. Teknologi ini dapat menghasilkan berbagai pelayanan publik dengan berbagai manfaat, penyampaian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi antara pelaku bisnis dan

dunia industri, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan akses informasi publik.

Saat ini pelaksanaan e-Government masih menghadapi permasalahan terkait perencanaan, kebijakan, kelembagaan, aplikasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, Layanan dan anggaran TIK.

Permasalahan tersebut berusaha di atasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menerbitkan cetak biru *e Government* Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 sebagai panduan implementasi *e-Government*. Cetak biru tersebut mengamanatkan transformasi perubahan *e-Government* menuju *Smart Governance*. Transformasi tersebut dituangkan dalam *roadmap* pengembangan *smart Governance* dengan fokus pada pengembangan sistem informasi manajemen perangkat daerah dan infrastruktur TIK terpadu, penyusunan kebijakan TIK dan integrasi data serta pengembangan layanan berbasis aplikasi *mobile* dan Sistem Informasi Eksekutif.

2. Peningkatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian keterbukaan informasi.

Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi (95%), internet (33%), radio (20%), koran (12%), dan media lainnya (22%). Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan pemerintah menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah.

Pemerintah Kota Balikpapan menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika untuk:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;

2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan Organisasi perangkat daerah ;
3. Melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;
4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan walikota;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Walikota, , Kepala Organisasi Perangkat daerah dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (*Government Public Relation "GPR"*). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda setting akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

I.5.1 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Statistik

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang urusan adalah adalah:

1. Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, valid dan komprehensif perlu ditingkatkan.

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti

I.5.2 Permasalahan Strategis Bidang Urusan Persandian

Dalam Dokumen Perencanaan pembangunan daerah, tidak terdapat permasalahan strategis

I.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2016–2021 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB 4 PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2017 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tentang Indikator Kinerja Utama

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2017 sampai dengan 2021

Penyusunan Renstra 2016–2021 dilakukan dengan menyelaraskan masalah strategis yang ada di Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dibutuhkan kebijakan yang dapat menghadapi berbagai masalah strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

Arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di Kota Balikpapan yang tinggi di satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika agar mampu menuangkan kebijakan yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat yang sangat dinamis ke dalam Renstra, mengingat peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *Government Chief Information Officer* (G-CIO) Pemerintah Kota Balikpapan Dalam konteks ini Dinas Komunikasi dan informatika merumuskan visi

“ Mewujudkan Balikpapan Smart Governance”

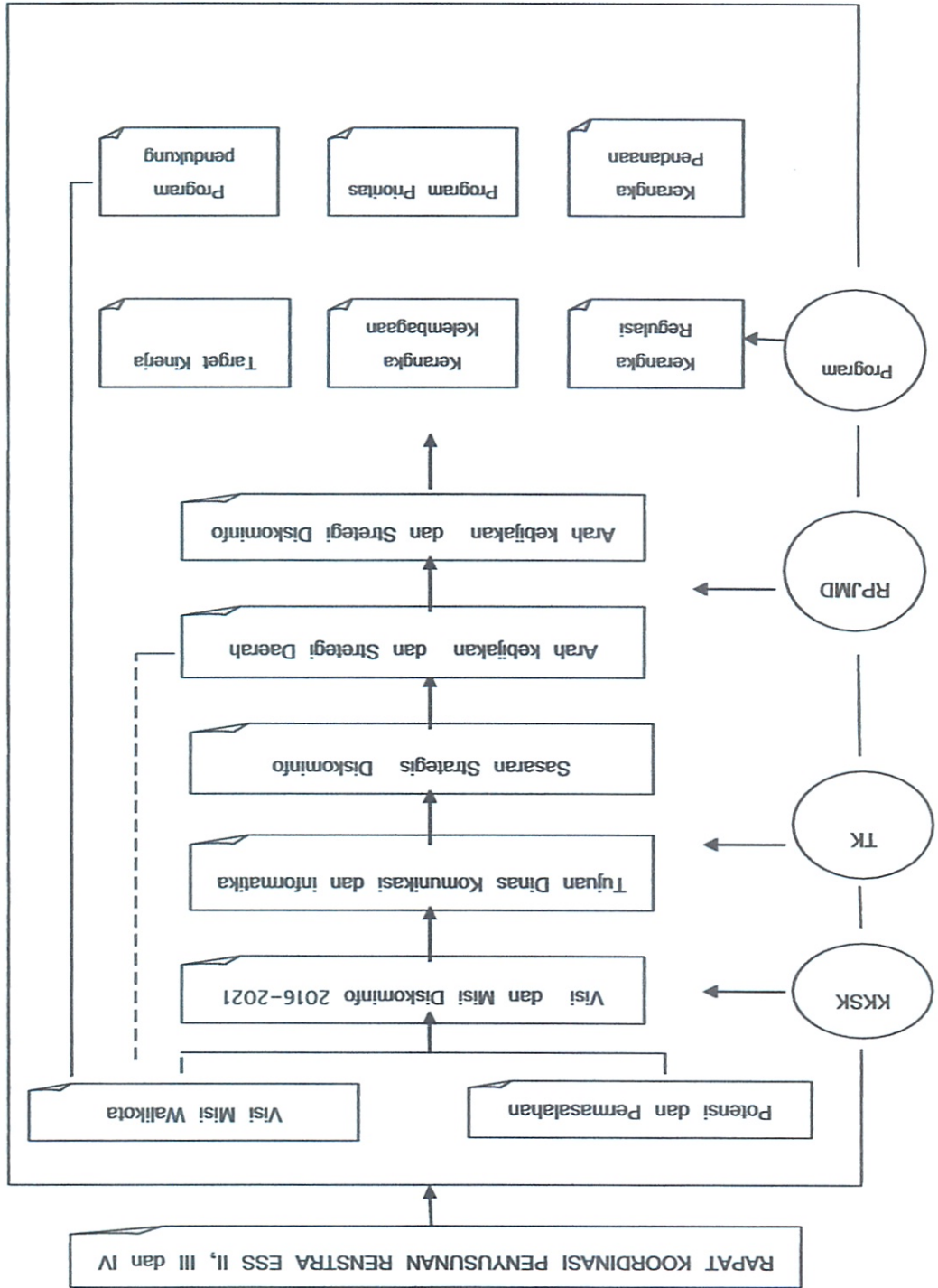
Smart Governance adalah gambaran pelayanan publik masa kini yang berorientasi pada efisiensi, pada kebutuhan masyarakat, tidak berbatas ruang dan mengedepankan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. *Smart governance* dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa *smart* pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya. *Smart*

governance memanfaatkan teknologi Informasi Komunikasi yang ada untuk memfasilitasi dan mendukung perencanaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.. Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memformulasikan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Membangun Keterbukaan Informasi
2. Memperkuat dan mengembangkan penerapan *e Government* melalui *e Governance*

Secara umum alur penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana dalam gambar berikut;

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Balikpapan Tahun 2016-2021



Gambar 2.1 Alur Penyusunan Renstra Diskominfo

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
Visi	Mewujudkan Balikpapan Kota Terkemuka, Nyaman dihuni , dan Berkelanjutan menuju Madinatul iman	Mewujudkan Balikpapan Smart Governance
Misi	Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Membangun Keterbukaan Informasi Publik 2. Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance
Tujuan	Tujuan 8. Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	1. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasisTIK
Sasaran	Sasaran 10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. 2. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat
Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi 3. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional informasi melalui: Pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan	1. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi para stakeholders terkait implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota melalui: menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media 2. Menyediakan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau

Tabel 2.1 Kesesuaian Renstra dengan RPJMD

<p>investasi pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan e-pengelolaan government (tata kelola, regulasi) • Pengembangan dan pengembangan aplikasi • Pengendalian keamanan data dan informasi 	<p>e government melalui:</p>
---	------------------------------

Aspek	RPJMD Kota Balikpapan	Renstra Dinkominfo
		5. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir periode perencanaan (tahun 2021).

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di rinci per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat menyesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi). Demikian pula dengan target indikator Sasaran Strategis.

Penentuan besaran sasaran strategis ditetapkan berdasarkan harapan *stakeholders*, kondisi internal maupun eksternal penetapan besaran strategis dihasilkan dari rapat koordinasi jajaran eselon II,III dan IV dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan ,sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renstra Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

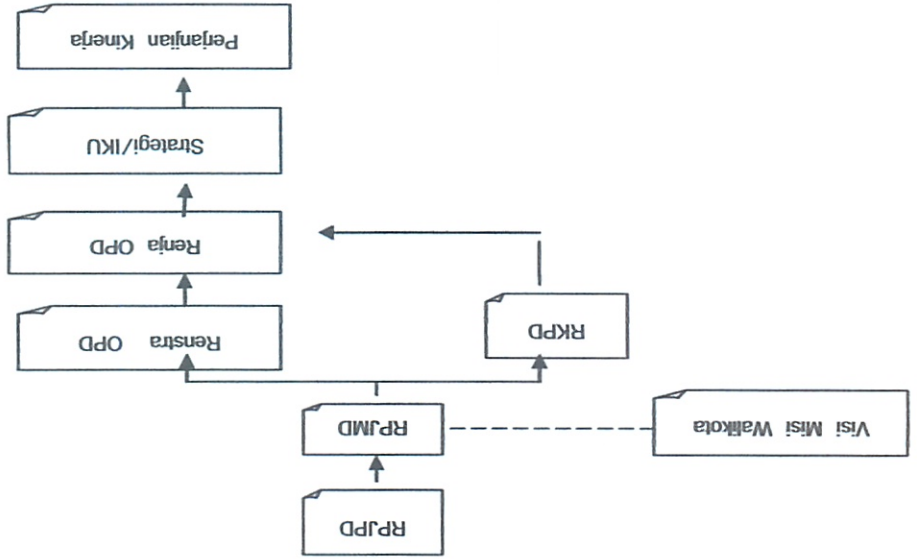
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	65,5	70,5	73,5	77,5	81,25

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
pelayanan publik berbasisTIK							
	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	84%	91%	95%	98%	100%

Sasaran Strategis diatas akan dicapai melalui 5 program .Adapun ke 5 Program tersebut adalah:

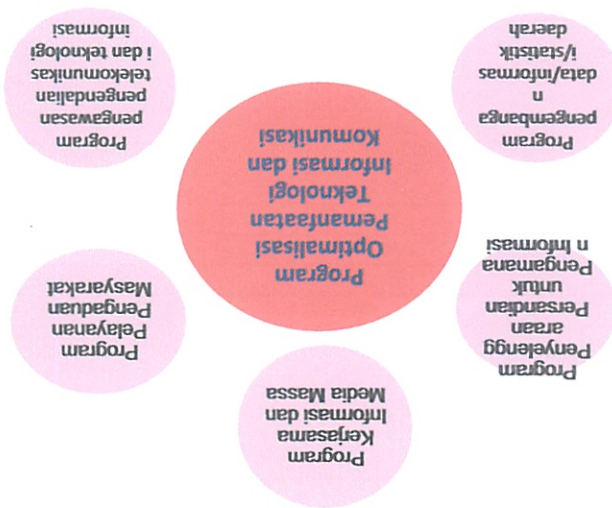
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Program Kerjasama informasi dan Media Masa
3. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi



Gambar 2.3 Alur Penyusunan Perjanjian Kinerja Diskominfo

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

II.2 PERJANJIAN KINERJA



GAMBAR 2.2 Program Prioritas dan program Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 diuraikan seperti pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2017
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik.	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	65.5
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	84 %

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 diimplementasikan melalui 1 (satu) program prioritas dan 3 (tiga) program pendukung seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Program Prioritas)

Tujuan dari program ini adalah mengoptimalkan teknologi informasi Komunikasi sebagai pendukung penerapan e government dalam rangka pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat Kota Balikpapan. Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut;

1. Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa
2. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government
3. Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Sewa Bandwidth Internet
5. Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer
6. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi

2. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi (Program Pendukung)

Tujuan dari program ini adalah untuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi agar pelayanan publik terkait dapat dilaksanakan secara maksimal Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut;

1. Pembinaan Pos dan Telekomunikasi

3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa (Program Pendukung)

Tujuan dari program ini adalah menyebarluaskan informasi kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan agar masyarakat memiliki informasi yang berimbang tentang Pemerintah Kota Balikpapan mengingat banyak terjadi hoax saat ini. Program Ini juga merupakan perwujudan peran Dinas Komunikasi dan informatika sebgai GPR. Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut

1. Diseminasi Informasi Daerah
2. Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa

4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, *up to date*, valid dan komprehensif. Program ini di laksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
2. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

5. Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

Tujuan program ini adalah upaya pemerintah kota balikpapan dalam melindungi informasi publik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan;

1. Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam hal ini menggunakan standar pengukuran ordinal

$$\text{CAPAIAN IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Standar pengukuran ordinal

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	85-100	Sangat Baik
3	70-84	Baik
2	55-69	Cukup Baik
1	Kurang dari 55	Kurang

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis. Adapun kedua sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2017
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Nilai Kepuasan Masyarakat	65.5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2017
2	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	84 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.162.050.000	APBD MURNI
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.300.000.000	APBD MURNI
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	45.000.000	APBD MURNI

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2017 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Misi I	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	65.5	78.93	121% (tercapai)
Membangun Keterbukaan Informasi				
Tujuan				
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis TIK				
Sasaran				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik				
Misi II				
Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance				

Nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan tersebut dikali dengan 0,1667. Dari hasil perkalian masing-masing unsur tersebut kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Kemudahan prosedur layanan	3,248
U2	Kemudahan akses kanal	3,248
U3	Kesopanan gaya bahasa petugas	3,349
U4	Kualitas/kejelasan informasi	3,106
U5	Kesesuaian informasi dengan aduan yang disampaikan	3,115
U6	Kecepatan respon petugas	2,904

masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik terdapat indikator sasaran skor hasil nilai indeks kepuasan masyarakat yang pada awal tahun 2017 memiliki target 65,5 kemudian realisasi skor yang tercapai di Tahun 2017 memiliki skor 78,93 (baik) sehingga capaian kinerja 121%. Responden yang diperoleh berjumlah 218 responden. Adapun skor rata-rataunsur hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

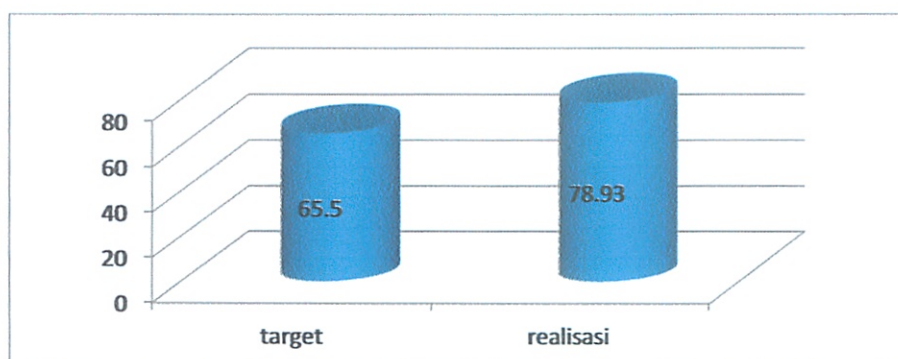
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian
		Tahun 2017		
Meningkatnya Peran Aktt Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasisTIK	Tujuan			
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	Sasaran			
	Perentase pemanfaatan SPBE atau e pemerintah pada perangkat daerah	84 %	84%	100% (tercapai)

nilai 3,157. Angka 3,157 kemudian dikali dengan 25 sehingga diperoleh nilai skor hasil nilai indeks kepuasan masyarakat 78,93%. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk di tahun 2017 sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Oleh karena itu belum bisa membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Hambatan yang ditemui dari indikator kinerja *nilai IKM* adalah responden (masyarakat) kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya secara obyektif. Hal ini penyebabnya adalah kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survey IKM. Solusi atas permasalahan diatas adalah:

1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (*public service*) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.
2. Diperlukannya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan mau serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.
3. Perlunya peningkatan SDM aparatur melalui seminar-seminar, pelatihan, dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survey IKM.

Gambar 3.1 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU

Skor hasil nilai kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan aduan masyarakat



2. Pada sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau *e government* dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat terdapat indikator sasaran **Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah**. Target sasaran ke 2 (dua) pada awal tahun disusun sebesar 84%, kemudian di akhir tahun 2017 capaian indikator kinerja yang diperoleh sebesar 84 % dan mendapat capaian sasaran sebesar 100 % dari target yang telah ditentukan. Sasaran ke -2 dengan indikator kinerja Persentase pemanfaatan SPBE atau *e government* pada perangkat daerah memiliki formulasi jumlah aplikasi yang diinginkan berbanding dengan jumlah aplikasi yang ada pada Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah Aplikasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 47 Aplikasi dan di tahun 2017, terealisasi 47 aplikasi yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. 47 aplikasi terdiri 35 aplikasi yang diinginkan sampai 2016 ditambah 12 aplikasi yang diinginkan sampai dengan 2017.. Adapun daftar aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

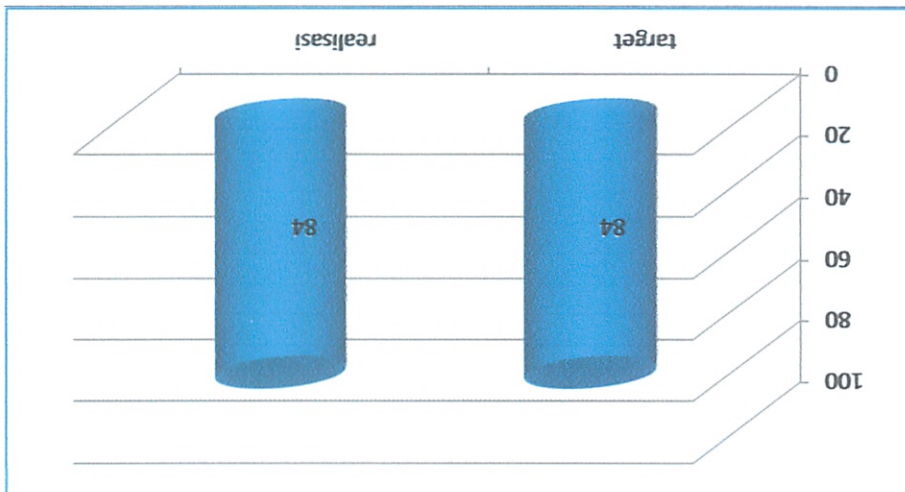
Tabel 3.3

Tabel daftar Aplikasi yang diinginkan dan daftar aplikasi yang tersedia

No	OPD	Nama Aplikasi		2017		Aplikasi yang diinginkan	
1	BKPS DM	1	e-presensi			1	Integrasi dengan SIAK, SIPKD
		2	tamisu				
		3	KGB				
2	BPKD	1	SIPKD			1	Integrasi dengan e-Planning
		2	SIMDA				
3	BPPD RD	1	SIMPAD				
		2	SISMIOP				
4	BAPPE DA LITBANG	1	Sistem Informasi Data Spasial				

No	OPD	Nama Aplikasi	2017	Aplikasi yang diinginkan
			1	e-Planning
			1	Database Pembangunan
5	DISDU KCAPIL	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	1	
		KTP-elektronik	2	
		Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan (Administrasi Layanan Surat Untuk Masyarakat)	3	
		Sistem Informasi Pelayanan Kelurahan (SIMYANKEL) - Administrasi Layanan Surat Untuk Masyarakat	4	
6	DINKE S	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	1	Pendaftaran Online untuk RSUD dan RSKB
		Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD)	2	
7	DISKO MINFO	E-kinerja	1	Beasiswa
		Integrasi SIMPAD	1	
		SiTanggap	1	
		e-Office	1	
8	DKUM KMP	SIM Data Industri	1	
9	DP3			1 SINelayan
10	DIPOR APAR	SIDIA (Sistem Informasi Data Induk Atef)	1	Antrian Online
11	DMPPT	Sistem Informasi Cerdas Layanan Untuk Publik (SiCanatik)	1	

No	OPD	Nama Aplikasi	2017	Aplikasi yang diinginkan
12	DISDI KBUD	Sidalah (Sistem Informasi Data Sekolah) http://sidalah.balikpapan.go.id/	1	
		Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP)	2	
13	DISHU B	SIM-PKB (Sistem Informasi Manajemen - Pengujian Kendaraan Bermotor)	1	
		SIMAU (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum)	2	
14	Dinas Perpus takan	MySipisis	1	
		Balikipapan (perpus takan digital mobile apps untuk masyarakat)	1	
		Education Tube (Bdu Tube) video pembelajaran - off line	2	
15	DPPR	SIM IMTN (Pelayanan Ijin Mengolah Tanah Negara)	1	
16	DISNA KER	Sistem Informasi Tenaga Kerja (Pendataan Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan)	1	
		SIM Hubungan Industrial	1	
17	Inspektorat A		1	Integrasi Peirziman
18	SETD A	SIM Bansos	1	
		JDIH	2	Agenda Online
			1	SIM PBJ
			1	e-LHP



Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU Pemanfaatan SPBE atau *e government* pada Pemerintah Kota Balikpapan

Gambar 3.1.2

No	OPD	Nama Aplikasi	2017	Aplikasi yang diinginkan
3		Informasi Coffee Morning (ICON)		
4		Penggajian		
5		SPPD		
6		Kendaraan Dinas		
7		SIMONTepa		
8				
19	DISDA G	1 SIM Pasar	35	9
			56	
			21	

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya SDM bidang TIK dalam pelaksanaan pengintegrasian sistem aplikasi. Oleh karena itu solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan merekrut tenaga ahli dibidang TIK (Programmer) diluar ASN dan melakukan *transfer knowledge* kepada tenaga ahli TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Sama dengan indikator sasaran skor hasil nilai kepuasan masyarakat diatas, capaian indikator sasaran Persentase pemanfaatan SPBE atau *e government* pada perangkat daerah belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dibandingkan dengan target jangka menengah.

Pencapaian indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan program dan kegiatan DPA Tahun 2017 . Program dan kegiatan tersebut akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

tabel 3.4

Pencapaian indikator sasaran berdasarkan program dan kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil Kepuasan Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Rp 80.950.800	Rp 77.139.500	95%
		Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Diseminasi Informasi Daerah	Rp 237.946.000	Rp 229.530.000	96%
			Pelaksanaan Diseminasi melalui media publik	Rp 1.370.000.000	Rp 1.291.387.289	94%
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah	Persentase pemanfaatan SPBE atau <i>e government</i>	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 316.300.000	Rp 256.262.000	81%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat	pada perangkat daerah	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	Rp 426.650.000	Rp 268.588.785	63%
			Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp 650.000.000	Rp 577.265.750	89%
			Sewa Bandwidth Internet	Rp 2.000.000.000	Rp 1.877.656.000	94%
			Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	Rp 239.100.000	Rp 218.492.300	91%
			Smart City	Rp 1.480.000.000	Rp 801.744.180	54%

III.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. yang diukur atas realisasi terhadap APBD Dinas Komunikasi and Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2017 (setelah perubahan), maka realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Menara telekomunikasi	417.000.000,00	406.531.200,00	97,49%
Belanja	11.760.509.800,00	9.697.817.341,00	82,46%

Total Anggaran Pendapatan Retribusi daerah adalah sebesar Rp 417.000.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 406.531.200. Sedangkan total anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebesar Rp.11.760.509.800 dan realisasi anggarannya mencapai Rp 9.697.817.341 atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,46%, maka dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 2.062.692.459 hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebesar Rp 11.760.509.800 terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.519.602.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.254.808.882 (89,49%).
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 9.240.907.800 dengan realisasi sebesar Rp 7.443.008.459 (80,54%) yang terbagi atas :
 - 1) Anggaran pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 2.439.961.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.844.942.655 atau 75,61 %;
 - 2) Anggaran pelaksanaan 3 (tiga) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sebesar Rp 6.800.946.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.598.065.804 atau 82,31 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2017 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.6

Tabel perbandingan target dan realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai sasaran strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai Indeks Kepuasan	65.5	78,93	121 %	1.688.896.800	1.598.056.789	94,62

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Masyarakat						
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau <i>e government</i> dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan thd masy	Persentase pemanfaatan SPBE atau <i>e government</i> pada perangkat daerah	84 %	84 %	100 %	5.112.050.000	4.000.009.015	78,25 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada tahun 2017.

Terdapat ketidaksesuaian Program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun anggaran 2017 hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika baru berdiri pada awal Januari 2017 sementara DPA Dinas Komunikasi dan Informatika di susun pada akhir tahun anggaran 2016 oleh OPD terdahulu yang memegang tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, statistic dan persandian sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri.

Perbedaan Numenklatur Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Tabel perbandingan program dan kegiatan dalam Renstra dengan DPA 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Renstra 2016-2021	Program dan Kegiatan	DPA 2017	
				Anggaran		Anggaran	realisasi
				Rp		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor hasil nilai kepuasan masyarakat	Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi	Rp 45.000.000	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 80.950.800	Rp 77.139.500
			- Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Rp 45.000.000	Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Rp 80.950.800	Rp 77.139.500
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp 1.300.000.000		Rp 1.607.946.000	Rp 1.520.917.289
			- Diseminasi Informasi Daerah	Rp 300.000.000	Diseminasi Informasi Daerah	Rp 237.946.000	Rp 229.530.000
			- Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp 1.000.000.000	Pelaksanaan Diseminasi melalui media publik	Rp 1.370.000.000	Rp 1.291.387.289
Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah masy	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah masy	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 5.162.050.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 316.300.000	Rp 256.262.000
			- Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 346.300.000	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 316.300.000	Rp 256.262.000
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 4.795.750.000	Rp 3.743.747.015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Renstra 2016-2021	Program dan Kegiatan	DPA 2017	
				Anggaran		Anggaran	realisasi
				Rp		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			- Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	Rp 426.650.000	Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	Rp 426.650.000	Rp 268.588.785
			- Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp 650.000.000	Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp 650.000.000	Rp 577.265.750
			- Sewa Bandwidth Internet	Rp 2.000.000.000	Sewa Bandwidth Internet	Rp 2.000.000.000	Rp 1.877.656.000
			- Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	Rp 239.100.000	Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	Rp 239.100.000	Rp 218.492.300
			- Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	Rp 1.500.000.000	Smart City	Rp 1.480.000.000	Rp 801.744.180
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.578.288.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.117.509.000	Rp 1.628.105.518
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.000.000	Rp 408.000
			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 120.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp -	Rp -
			- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 38.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 12.000.000	Rp 1.013.500
			- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 20.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp -	Rp -
			- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 48.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 48.000.000	Rp 45.039.016
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 62.500.000	Rp 61.790.750

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Renstra 2016-2021	Program dan Kegiatan	DPA 2017	
				Anggaran		Anggaran	realisasi
				Rp		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp -	Rp -
			- Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 85.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 83.350.000	Rp 28.738.000
			- Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Rp 856.350.000	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Rp 856.350.000	Rp 819.454.504
			- Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 314.938.000	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 1.051.309.000	Rp 671.661.748
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 114.452.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 322.452.000	Rp 216.837.137
			- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 64.452.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 294.452.000	Rp 206.001.380
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 3.000.000	Rp 1.155.000
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 25.000.000	Rp 9.680.757
				Rp 8.199.790.000		Rp 9.240.907.800	Rp 7.443.008.459

III.3 Capaian Prestasi dan penghargaan

Selama tahun 2017. Dinas komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 2 penghargaan dari lembaga pemerintah. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.8
Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2017

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Panji Keberhasilan Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim
2	Terbaik II Bidang Keberhasilan Pengelolaan e-Government	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016–2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) tahun 2016–2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2017 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya.

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.

2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan
4. Meningkatkan dan menambah SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Balikpapan
5. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang informasi komunikasi dan publikasi
6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Dinas Komunikasi dan Informatika. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya, Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, dan berkelanjutan menuju madinatul iman

Balikpapan, Februari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Tatang Sudirja



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jend. Sudirman RT.13 No.1, Telp dan Fax. (0542) 737584, email : diskominfo@balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR 900 / /DISKOMINFO

TENTANG
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan;

MEMUTUSKAN

Memutuskan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur aparatur sipil negara dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut
1. Pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017;
 2. Hal- hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal Maret 2017

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Balikpapan**



Tatang Sudirja

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN NOMOR: 900/ /DISKOMNIFO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2017-2021
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA
BALIKPAPAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target IKU 2017-2021	Tahun Target IKU					Keterangan	
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	-	65,5	65,5	70,5	73,5	77,5	81,25	
2	Meningkatnya pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e government	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah		84%	84%	91%	95%	98%	100%	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN



Tatang Sudirja

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB
1.	Skor Hasil Kepuasan Masyarakat	Skor hasil nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
2.	Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	= jumlah aplikasi yang diinginkan/ jumlah aplikasi yang ada	X 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN


Tatang Sudirja